Kewarganegaraan Digital dan Aktivisme Anak Muda:

Tantangan Demokrasi ke Depan

The Indonesia Forum Seri ke– 124

29 September, 2025

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Mahasiswi ITB pembuat meme 'ciuman' Prabowo-Jokowi jadi tersangka – 'Kritik jangan dilihat sebagai kebencian personal'

TEMPO Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Hukum Hukum Perilaku Kriminal

Kriminal

Mahasiswa di Riau Alami Doksing Usai Kritik Rekrutmen Polri

Doxing ini terjadi usai sejumlah mahasiswa di Riau menyinggung polisi harus sarjana

19 Agustus 2025 | 17.34 WIB

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, 'buang duit yang efektif?'

kumparanNEWS Cari di sini...

News Entertainment Tekno & Sains Bisnis Bola & Sports Otomotif

Breaking News Green Initiative Halal Living Video Story Trending kumparanPl

Mahasiswa UNY Korban Hoaks Pelecehan Seksual & Doxing Sudah Mulai Kuliah Lagi

kumparanNEWS

TEMPO Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Hukum Hukum Perilaku Kriminal

Kriminal

KKJ Ajukan Perlindungan bagi Jurnalis Tempo Korban Teror Kepala Babi hingga Doxing ke LPSK

KKJ ajukan perlindungan tujuh korban teror maupun intimidasi terhadap jurnalis Tempo dalam beberapa waktu terakhir kepada LPSK.

26 Maret 2025 | 16.11 WIB

TEMPO Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Hukum Hukum Perilaku Kriminal

Kriminal

Direktur LBH Padang Mendapat Serangan Doxing serta Teror di Whatsapp

Pencarian Tempo, ada tiga akun yang juga mem-posting data Direktur LBH Padang yakni

KOMPAS.com News Nusaraya Jagat Literasi NEW Cahaya NEW Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Lestari Health Money Properti Edukasi Tra

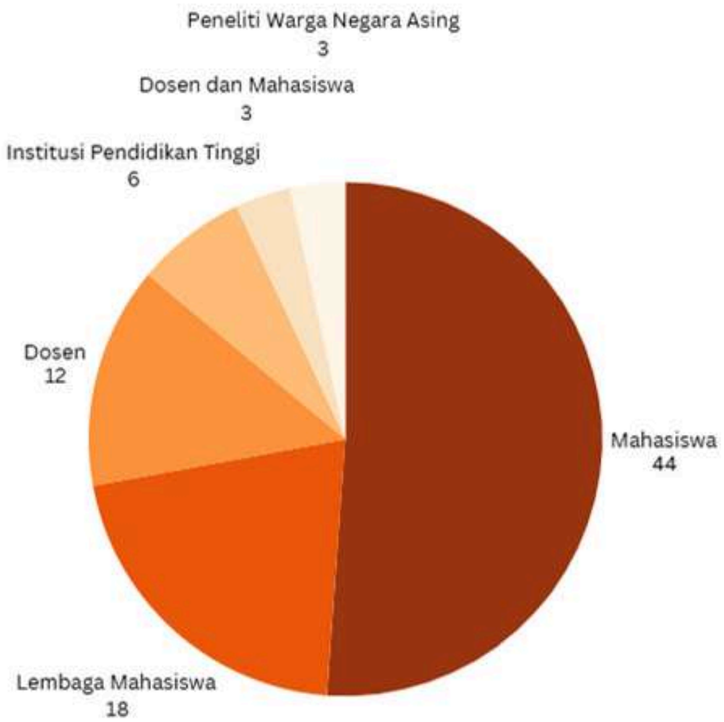
BAGIKAN: Bos Buzzer Terima Rp 864,5 Juta untuk Rintangi Penanganan Kasus Kejagung

Kompas.com / News / Nasional

Bos Buzzer Terima Rp 864,5 Juta untuk Rintangi Penanganan Kasus Kejagung

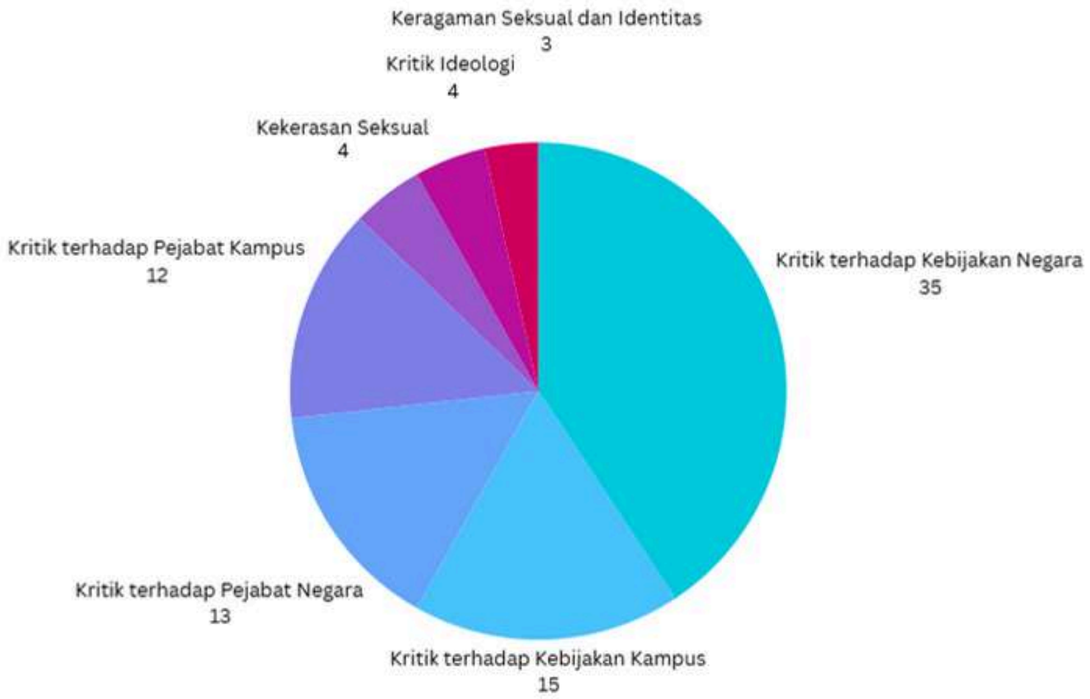
Kompas.com - 08/05/2025, 01:03 WIB

DATA THE INDONESIAN INSTITUTE



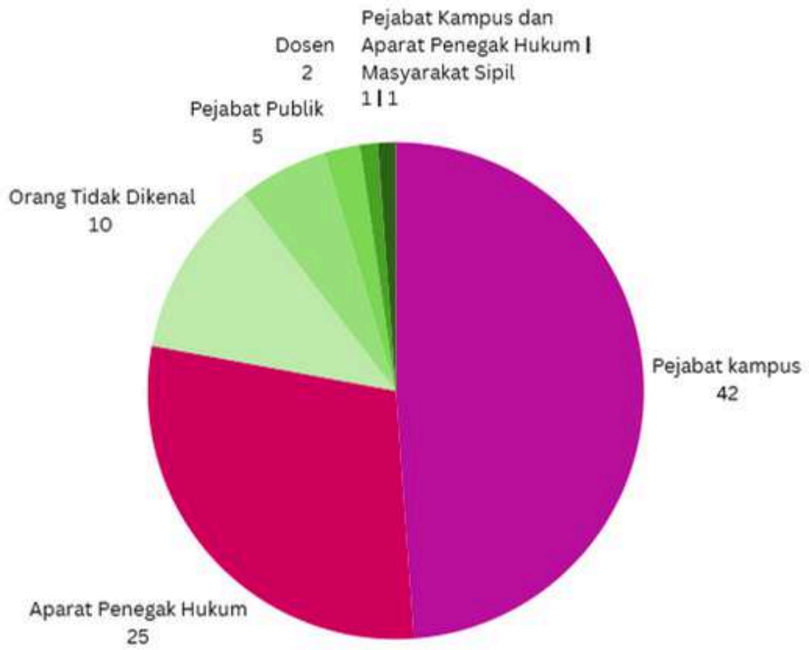
THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

DATA THE INDONESIAN INSTITUTE



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

DATA THE INDONESIAN INSTITUTE



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

MATINYA KEPAKARAN, LAHIRNYA INFLUENCER-AKTIVIS?



Pakar makin diabaikan: suara akademisi kalah gaung dibanding influencer.



Opini vs Data: algoritma platform lebih mengangkat konten yang viral, bukan yang valid.



Aktivisme jadi personalitas: fokus pada “siapa yang bicara” ketimbang “apa yang dibicarakan.”



- **Risiko: diskusi publik dangkal, mudah digiring narasi populer.**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

KEBIJAKAN SEBAGAI ARENA WACANA (DISCOURSE ANALYSIS)

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kebijakan = Kontestasi Makna

Jadi.....



Fokus bukan hanya hasil:
bukan cuma soal rekomendasi diterima.



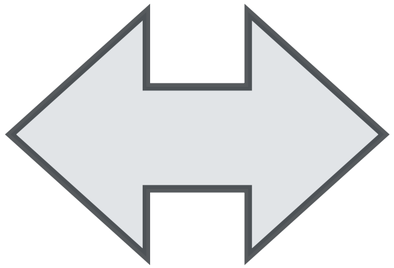
Perhatikan proses :
siapa ngomong, narasi apa yang dipakai, siapa yang menang/terpinggirkan.



Analisis membantu:
bongkar framing & posisi kuasa di balik kebijakan.

POWER WORKS SIDEWAYS TOO.....

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH





Tidak cuma top-down – relasi kuasa juga bergerak secara horizontaal antaraktor: media, influencer, komunitas.

Era digital – influencer & komunitas online jadi aktor baru.

PERTANYAANNYA: SIAPA YANG MENDOMINASI WACANA, DAN SIAPA YANG DI-SILENCE?

REKOMENDASI

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

1. Kementerian Digital dan Komunikasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panja revisi UU ITE, khususnya ketentuan soal pasal pencemaran nama baik, agar hanya korban individu yang dapat mengajukan laporan, sesuai putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik untuk membungkam kritik dan memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi.
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyederhanakan persyaratan administratif untuk program bantuan wirausaha dan hibah kepemudaan, termasuk digitalisasi pendaftaran dan penghapusan syarat yang tidak relevan (misalnya, syarat legalisasi institusi, surat keterangan tertentu yang sulit diakses di daerah dll).
3. Organisasi masyarakat sipil memperkuat strategi komunikasi berbasis riset audiens, menggunakan bahasa yang mudah diterima kelompok muda dan memanfaatkan kolaborasi dengan influencer hanya untuk raising awareness, sementara advokasi tetap dilakukan berbasis data dan evidence.

GETTING CRIMINALIZED CAN HAPPEN TO LITERALLY ANYONE.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute